



LAPORAN KINERJA KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN TAHUN 2024

JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 1
TELP. : 7990020 – 7990016 FAX: 7991035
JAKARTA SELATAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan tahun 2024. Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan tahun 2024 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas tercapainya kinerja sepanjang tahun 2024 sesuai Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 20, dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja perlu dituangkan sesuai sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang untuk beberapa hal disesuaikan dengan kondisi yang ada pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Disamping itu sebagai pedoman penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan pedoman penyusunan, maka pada saat telah berakhirnya evaluasi kinerja periode 2024 LAKIN disusun, ditetapkan dan disampaikan secara lengkap.

Visi dan Misi yang telah digariskan oleh pimpinan Direktorat Jenderal Pajak yang juga menjadi Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, menjadi komitmen bersama untuk direalisasikan melalui tindakan nyata oleh seluruh karyawan dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yang akhirnya diukur akuntabilitas kinerjanya.

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun guna memberikan gambaran yang jelas dan transparan dari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan selama periode tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Berlakang	4
B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Sumber Daya	4
C. Sistematika Pelaporan	10
BAB II.....	11
PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kinerja	14
BAB III.....	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	17
C. Kinerja Lainnya.....	30
D. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV	31
PENUTUP	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Penutup.....	31

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun 2024 memberikan gambaran informasi kinerja dan pertanggungjawaban Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan, antara lain:

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah
“Menjadi KPP Pratama yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan sesuai dengan peraturan dan kode etik DJP.”
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah
“Menghimpun penerimaan pajak sesuai target yang ditetapkan dan menyelenggarakan pelayanan prima kepada WP.”
3. Tugas pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam tahun 2024 dicapai dengan jumlah Nilai Kinerja Organisasi secara keseluruhan sebesar 107.45%.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah wilayah di Kecamatan Mampang Prapatan (wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan) yang sebagian besarnya merupakan wilayah pemukiman yang peruntukannya bukan untuk lokasi usaha, Wajib Pajak pindah yang tergolong kriteria Wajib Pajak besar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, penurunan penerimaan dari Bendahara karena proyek-proyek pemerintah yang telah selesai, peningkatan jumlah restitusi yang signifikan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap negara.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada masa-masa yang akan datang adalah mengintensifkan penyuluhan dan pembinaan berbagai kebijakan perpajakan baru kepada Wajib Pajak baik secara daring maupun luring sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, melakukan langkah-langkah ekstensifikasi dan upaya dinamisasi setoran pajak berdasarkan data hasil pemeriksaan dan penelitian, mengupayakan pencairan tunggakan melalui tindakan persuasif dan penagihan aktif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 1, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007, saat mulai operasi (SMO) bulan Juni 2007. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

B. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Sumber Daya

Sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama adalah sebagai unsur instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

1. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan..

2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian targer penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan NPWP;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objel Pajak secara jabatan;

- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Umum & Kepatuhan Internal membawahi beberapa urusan :
 - 1) Urusan Kepegawaian
 - 2) Urusan Keuangan
 - 3) Urusan Rumah Tangga
 - 4) Unit Kepatuhan Internal
- c. Seksi Penjaminan Kualitas Data
- d. Seksi Pelayanan
- e. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- f. Seksi Pengawasan I
- g. Seksi Pengawasan II
- h. Seksi Pengawasan III
- i. Seksi Pengawasan IV
- j. Seksi Pengawasan V
- k. Seksi Pengawasan VI
- l. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Adapun tugas dari masing-masing seksi dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan in tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpaj akan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian,

analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

- f. **Kelompok jabatan Fungsional** masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sumber Daya di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mengalami beberapa kali perubahan akibat adanya mutasi. Jumlah pegawai per akhir Desember 2024 adalah 106 pegawai. Pegawai KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berdasarkan seksi/kelompok dan jabatan dapat dilihat pada Tabel dan grafik 1, pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan dapat dilihat di Tabel 2, pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di Tabel 3, dan pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat di Tabel 4.

Dengan diberlakukannya Kantor Pelayanan Pajak Modern maka Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

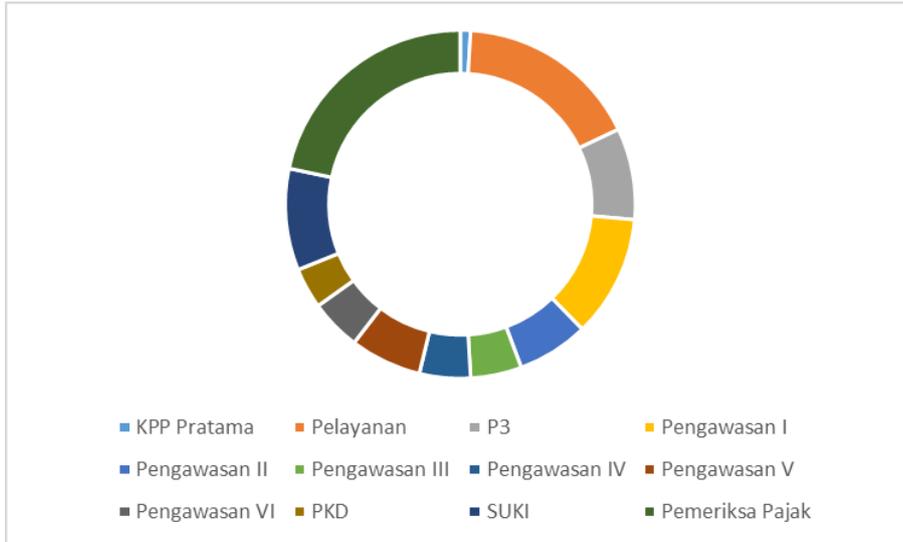
- 1) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- 2) Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Subbag/Seksi, Jabatan Fungsional, *Account Representative*, dan Pelaksana.

Adapun komposisi Pegawai KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

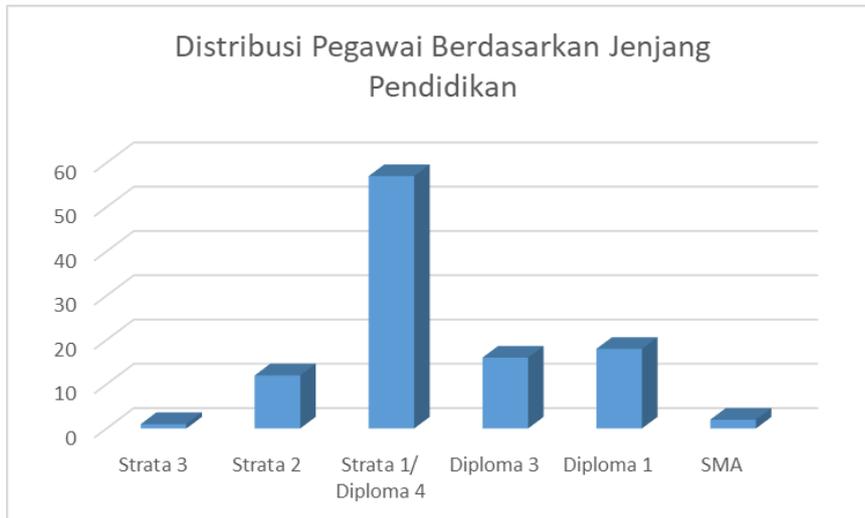
Tabel 1 : Tabel Pegawai Berdasarkan Tempat Kedudukan Dalam Seksi

	Kepala Kantor	Kepala Seksi	Supervisor	AR	Fungsional Pemeriksa Pajak	Penyuluh Pajak	Asisten Penyuluh Pajak	Juru Sita	Pelaksana	Total
KPP Pratama	1									1
Pelayanan		1				4	3	10		18
P3		1						2	6	9
Pengawasan I		1		10					1	12
Pengawasan II		1		5					1	7
Pengawasan III		1		4						5
Pengawasan IV		1		4						5
Pengawasan V		1		5					1	7
Pengawasan VI		1		4						5
PKD		1							3	4
SUKI		1							9	10
Pemeriksa Pajak			5		18					23
Total	1	10	5	32	18	4	3	12	21	106

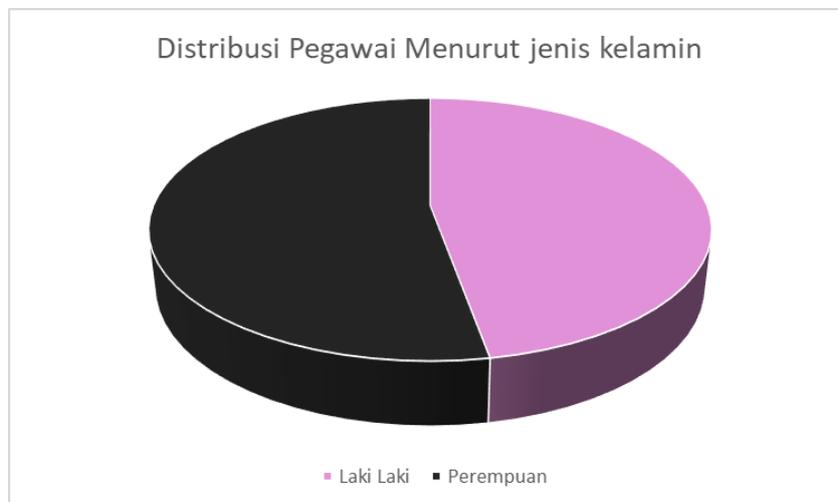
Grafik 1 : Pegawai Berdasarkan Tempat Kedudukan Dalam Seksi



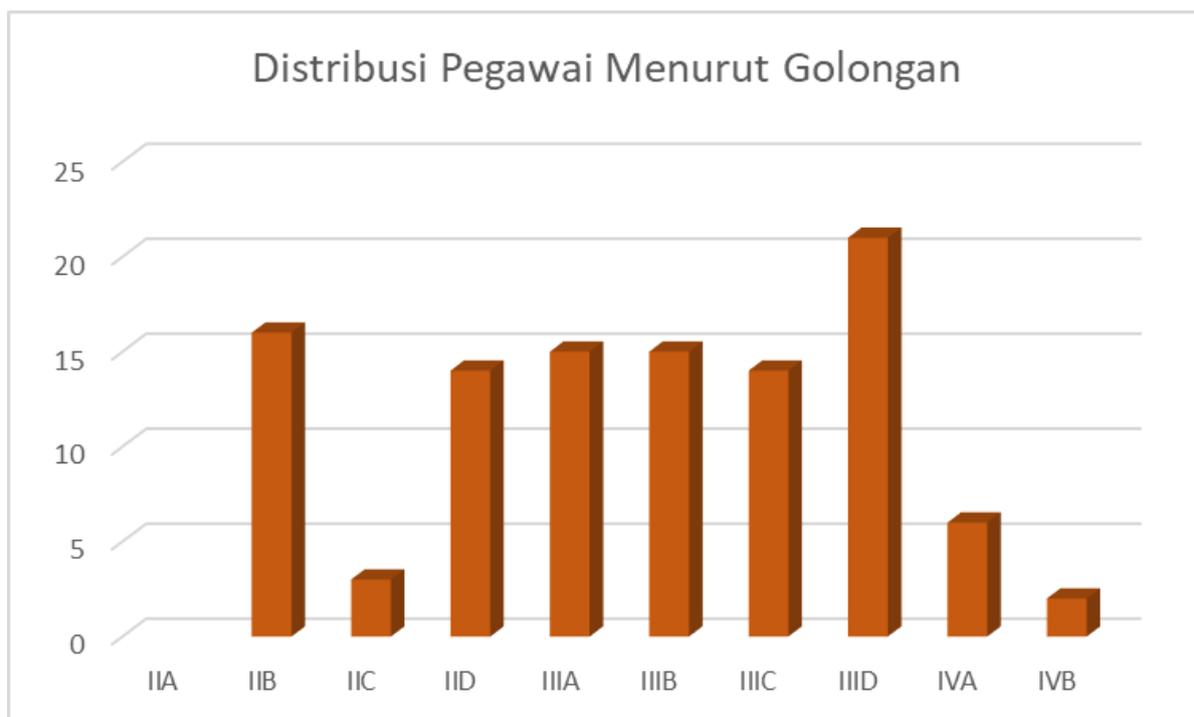
Tabel 2 : Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tabel 3 : Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 4 : Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan



b. Sumber Daya Wilayah

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang baru dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007. Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan meliputi 6 (enam) Kelurahan yaitu :

- Kelurahan Bangka
- Kelurahan Kuningan Barat
- Kelurahan Mampang Prapatan
- Kelurahan Pela Mampang
- Kelurahan Tegal Parang

5. Mandat yang diberikan kepada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Masih berlanjutnya sentimen negatif pelemahan ekonomi global maupun nasional, membawa dampak sangat signifikan pada perekonomian Indonesia, termasuk bagi DJP, khususnya KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Selain target penerimaan sebagaimana disebutkan sebelumnya, setiap unit termasuk KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga diberikan target berupa indikator kinerja utama yang harus dicapai yang akan tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi.

C. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 sistematika laporannya adalah sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif :
Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025
- Bab I: Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.
- Bab II: Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai perencanaan strategis dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.
- Bab III: Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai capaian kinerja organisasi, realisasin anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, dan evaluasi dan peningkatan akuntabilitas Kinerja
- Bab IV: Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi
- Lampiran:
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat Profl DJP, Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan, Arah Kebijakan Kementerian Keuangan, Arah Kebijakan DJP, Sasaran Strategis dan Target Kinerja. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

1. Pernyataan Visi dan Penjelasan

Visi DJP adalah *“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam Rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”*.

Adanya perubahan Visi tetap menjadikan DJP selalu berusaha menjadi institusi terbaik di negeri ini. Visi Direktorat Jenderal Pajak c.q. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.

Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak yang baru, terkandung dua cita-cita utama yang ingin dituju, yaitu menghimpun penerimaan negara demi menjamin kedaulatan negara di segala bidang dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari seluruh *stakeholder*.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasan

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, upaya pelayanan yang berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum yang adil baik bagi wajib pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi

Misi DJP c.q. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah suatu pernyataan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP dalam lingkungan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebagaimana diamanatkan oleh UU dan Peraturan serta kebijaksanaan pemerintah dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana DJP, khususnya KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, beraktivitas dan berinteraksi.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Instansi

a. Tujuan

Untuk mewujudkan suatu misi terlebih dahulu harus menetapkan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang menjadi faktor kunci keberhasilan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang seharusnya dapat dipungut berdasarkan potensi pajaknya.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam tahun anggaran 2024 yaitu tercapainya target penerimaan PPh, PPN, dan Pajak Lainnya, sebesar Rp. 5.083.869.120.000 (lima triliun delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh Sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah)

c. Kebijakan

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan
- 2) Pencapaian standar prestasi pemeriksaan
- 3) Pencapaian standar prestasi jurusita
- 4) Peningkatan koordinasi dengan kantor-kantor lain.

d. Program

Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan sarana, pembinaan kualitas SDM dan pengelolaan keuangan
- 2) Pengawasan
- 3) Ekstensifikasi
- 4) Penjaminan Kualitas Data
- 5) Pelayanan
- 6) Penagihan
- 7) Pemeriksaan
- 8) Penyuluhan/ sosialisasi

e. Kegiatan

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan selama tahun 2024 antara lain:

- 1) Pemeliharaan gedung
- 2) Mengusulkan Diklat
- 3) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan
- 5) Intensifikasi
- 6) Pengawasan pembayaran
- 7) Visit dan konseling
- 8) Ekstensifikasi WP OP Non Karyawan
- 9) Ekstensifikasi WP OP Karyawan melalui Pemberi Kerja / Bendaharawan
- 10) Pemeliharaan basis data
- 11) Melakukan dukungan sistem
- 12) Monitoring dan penyajian laporan
- 13) Penatausahaan data dan informasi

- 14) Pemantauan dan pemeliharaan software dan hardware
- 15) Peningkatan pelayanan dan layanan unggulan
- 16) Meningkatkan citra (image) DJP
- 17) Pembenahan berkas fisik
- 18) Menerbitkan surat teguran di bidang penagihan PPh dan PPN
- 19) Menerbitkan surat paksa di bidang penagihan PPh dan PPN
- 20) Melaksanakan penyitaan di bidang penagihan PPh dan PPN
- 21) Membuat pengumuman lelang di bidang penagihan PPh dan PPN
- 22) Penyelesaian pemeriksaan untuk permohonan restitusi PPN dan PPnBM
- 23) Memberikan tanggapan keberatan dan banding
- 24) Melakukan pemeriksaan khusus dan rutin

B. Rencana Kinerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam melakukan penyusunan rencana kinerja tahun 2024 mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama yang diberikan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak yang tentunya mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024.

1. Sasaran Strategi

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran Strategis KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;

2. Indikator Kinerja

Dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang telah direncanakan, digunakan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM;
17. Indeks Penilaian Integritas Unit;
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Capaian Kinerja Organisasi.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2024 ini. Berdasarkan sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Kode SSAKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	96,77
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,77
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,12
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	92,18	Max	P/L	19,00%	42,22%	92,18
Customer Perspective							20,00%	100,89
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,28
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,08%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,08
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,92%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,92
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,49
Internal Process Perspective							25,00%	116,69
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,54
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,08%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,08
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,69%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,15
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,47%	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,47
7	Penegakan hukum yang efektif							111,78
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,61%	Max	P/M	14,00%	26,92%	116,61
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	92,48%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00

Learning & Growth Perspective								25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,55	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,26	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,26	
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,64	
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,01	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,79	
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00	
Nilai Kinerja Organisasi								107,45	

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optima	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,12%	100,12%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	92.18	92.18

a. Persentase realisasi penerimaan pajak

Realiasi Penerimaan Pajak tahun 2024 sebesar 100,12% dengan nilai penerimaan mencapai Rp5.089.958.486.712,-.

Rencana aksi untuk tahun 2024 adalah meningkatkan pengawasan pembayaran rutin terhadap wajib pajak dan menerbitkan STP, menindaklanjuti data potensi perpajakan, menyusun peta kepatuhan wajib pajak dan daftar sasaran prioritas penggalan potensi (DSP3), mengusulkan pemeriksaan WP potensial melalui data sasaran pemeriksaan pajak (DSPP), melaksanakan kegiatan mirroring atas laporan hasil pemeriksaan, meningkatkan kegiatan pengawasan dan penggalan potensi terhadap wajib pajak serta melakukan konseling dan visit dalam rangka pengawasan/penggalan potensi.

Pada tahun 2024, penerimaan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah melampaui target yang ditetapkan sehingga capaian menjadi 100,12%. Penerimaan pajak yang paling dominan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berasal dari PPN Dalam Negeri dengan kontribusi sebesar 56,19% dengan capaian 128,97% dari target yang ditentukan, jenis pajak dengan penerimaan terbesar kedua adalah dari PPh Pasal 21 dengan kontribusi sebesar 43,62%, secara rinci penerimaan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan per jenis pajak ditampilkan pada tabel berikut.

Penerimaan per jenis pajak

URAIAN.	TARGET	BRUTO	SPMKP	NETTO	NETTO LALU	PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	KONTRIBUSI
A. Pajak Penghasilan	2.863.117.237.000	2.284.825.119.072	67.248.434.183	2.217.576.684.889	1.767.041.818.018	324%	108%	43,62%
1. PPh NON MIGAS	2.863.117.237.000	2.284.825.119.072	67.248.434.183	2.217.576.684.889	1.767.042.051.018	324%	108%	43,62%
1.1 PPh Pasal 21	854.947.453.000	859.053.542.391	4.797.817	859.048.744.574	760.827.661.844	420%	56%	16,90%
1.2 PPh Pasal 22	33.943.120.000	22.171.393.589	-	22.171.393.589	16.998.854.398	273%	128%	0,44%
1.3 PPh Pasal 22 Impor	220.144.973.000	143.797.060.186	-	143.797.060.186	57.504.454.247	273%	625%	2,83%
1.4 PPh Pasal 23	398.039.037.000	272.030.294.344	12.036.607.202	259.993.687.142	217.143.839.720	273%	84%	5,11%
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	30.203.752.000	66.865.333.680	313.601.025	66.551.732.655	61.130.033.885	919%	39%	1,31%
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	758.138.864.000	550.031.638.902	54.816.914.182	495.214.724.720	280.592.088.627	273%	320%	9,74%
1.7 PPh Pasal 26	167.533.035.000	109.509.307.305	76.513.957	109.432.793.348	98.851.201.046	273%	47%	2,15%
1.8 PPh Final	396.259.436.000	258.814.155.319	-	258.814.155.319	273.993.917.251	273%	-5.54	5,09%
1.9 PPh Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
1.10 PPh Non Migas Lainnya	3.907.567.000	2.552.393.356	-	2.552.393.356	-	273%	0%	0,05%
2. PPh MIGAS	-	-	-	-	233	0%	417%	0,00%
2.1 PPh Minyak Bumi	-	-	-	-	233	0%	417%	0,00%
2.2 PPh Gas Alam	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
2.3 PPh Minyak Bumi Lainnya	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
2.4 PPh Gas Alam Lainnya	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
B. PPN dan PPhBM	2.214.962.885.000	3.140.185.141.162	283.477.823.707	2.856.707.317.455	2.515.892.668.094	128.97	58%	56,19%
1. PPN Dalam Negeri	2.003.309.303.000	2.867.219.725.538	283.477.823.707	2.583.741.901.831	2.267.910.103.494	128.97	61%	50,82%
2. PPN Impor	182.429.835.000	235.286.688.100	-	235.286.688.100	200.697.738.215	128.97	72%	4,63%
3. PPhBM Dalam Negeri	7.719.000	2.293.120	-	2.293.120	18.182.208	-29.71	-112.61	0,00%
4. PPhBM Impor	28.904.802.000	37.279.621.287	-	37.279.621.287	47.068.324.000	128.97	-20.80	0,73%
5. PPN Lainnya	311.226.000	401.399.357	-	401.399.357	99.295.739	128.97	1268%	0,01%
6. PPhBM Lainnya	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
7. PPN DN DTP	-	-	-	-	99.024.438	0%	-100.00	0,00%
8. PPhBM DTP	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
C. PBB dan BPHTB	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
D. Pendapatan PPh DTP	-	-	-	-	1.213.692.642	0%	-100.00	-100.00
1. PPh Pasal 21	-	-	-	-	1.068.130.936	0%	-100.00	-100.00
2. PPh Pasal 22	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
3. PPh pasal 22 Impor	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
4. PPh Pasal 23	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
5. PPh Pasal 25/29 OP	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
6. PPh Pasal 25/29 Badan	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
7. PPh Pasal 26	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
8. PPh Final	-	-	-	-	145.561.706	0%	-100.00	-100.00
9. PPh Non Migas lainnya DTP	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
JUMLAH D	-	-	-	-	1.213.692.642	0%	-100.00	-100.00
E. Pajak Lainnya	5.788.998.000	15.674.484.368	-	15.674.484.368	9.276.180.198	270.76	68.98	0,31%
1. Bea Meterai	5.215.116.000	14.120.621.000	-	14.120.621.000	8.765.056.000	270.76	255%	0,28%
2. Penjualan Benda Meterai	-	-	-	-	432	0%	-100.00	0,00%
3. PTL	61	166.036	-	166.036	70	1135%	572%	0,00%
4. Bunga Penagihan PPh	557.496.000	1.509.495.715	-	1.509.495.715	433.492.142	270.76	1035%	0,03%
5. Bunga Penagihan PPN	16.325.000	44.201.617	-	44.201.617	77.130.056	270.76	-42.69	0,00%
6. Bunga Penagihan PPhBM	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
7. Bunga Penagihan PTL	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
8. PIB	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
9. PPN Batu Bara	-	-	-	-	-	0%	0%	0,00%
JUMLAH (A + B + C + D + E)	5.083.869.120.000	5.440.684.744.602	350.726.257.890	5.089.958.486.712	4.293.424.358.952	418%	79%	100,12%

Sumber : <https://appportal/>

- b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Penerimaan bruto tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mengalami pertumbuhan sebesar 17,74% dari penerimaan bruto tahun 2023. Capaian Pertumbuhan Unit Kerja sebesar 117,74% dan Capaian Pertumbuhan Nasional sebesar 112,11%. Berdasarkan data yang diperoleh dari <https://mandor-djp/> realisasi IKU pertumbuhan bruto Tahun 2024 telah tercapai maksimal 114,36%.

Sedangkan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan realisasi IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 adalah 70%. Deviasi proyeksi perencanaan kas setiap bulannya dapat dilihat dari table berikut:

No.	Bulan	Prognosa	Realisasi	Deviasi
1.	12. Desember	720.190.252.000	758.309.288.531	5,29 %
2.	11. November	612.577.569.000	413.170.697.120	32,55 %
3.	10. Oktober	430.731.053.000	412.222.923.622	4,30 %
4.	9. September	398.374.237.000	426.793.778.524	7,13 %
5.	8. Agustus	377.722.135.000	292.478.370.999	22,57 %
6.	7. Juli	392.704.378.000	419.358.560.489	6,79 %
7.	6. Juni	241.905.086.000	280.377.534.519	15,90 %
8.	5. Mei	336.176.325.000	297.431.473.983	11,53 %
9.	4. April	480.544.780.000	633.851.880.719	31,90 %
10.	3. Maret	263.327.006.000	273.848.879.208	4,00 %
11.	2. Februari	501.220.681.000	324.918.607.184	35,17 %
12.	1. Januari	472.614.103.000	557.196.491.814	17,90 %
TOTAL		5.228.087.605.000	5.089.958.486.712	2,64 %

Deviasi merupakan nilai absolut, dengan conditional formatting :
■ <=10% ■ >10% and <=15% ■ >15%

Sehingga capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah 92.18%.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,08%	100,08%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	102,92%	102,92%

a. Persentase Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Unit Kerja	Badan	OPK	OPNK	SPT Masuk	Wajib SPT	Target SPT	Realisasi	Trajectory	Capaian
Strategis	556	13	4	573	602	602	111,23%	100,00%	111,23%
Kewilayahan	3.906	19.649	2.467	25.212	34.170	28.304	102,74%	100,00%	102,74%
Total	3.652	19.662	2.471	25.785	34.772	28.906	102,92%	100,00%	102,92%

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada Tahun 2024 memiliki 34.772 wajib pajak yang wajib melaporkan SPT Tahun Pajak 2023, terdiri dari 602 wajib pajak strategis dan 34.170 wajib pajak kewilayahan. Dari 34.170 Wajib SPT wajib pajak kewilayahan ditargetkan sebanyak 28.304 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023. Sampai dengan 31 Desember 2024 secara total Kepatuhan Pelaporan SPT KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mencapai 102,92%, dengan wajib pajak strategis sebesar 111.23% (data mandor) yang disebabkan oleh adanya wajib pajak strategis yang pindah ke KPP lain sehingga realisasi pelaporan SPT wajib pajak strategis ikut berkurang. Sementara untuk wajib pajak kewilayahan pencapaian penyampaian SPT sebesar 102.92%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan untuk pencapaian IKU Kepatuhan pelaporan SPT diantaranya adalah sebagai berikut

- Publikasi Pemberitahuan Call Centre Layanan (Jampang Help) dan Optimalisasi satgas penerimaan SPT Tahunan;
- Melakukan sosialisasi kewajiban pelaporan SPT, bekerjasama dengan pemberi kerja, instansi pemerintah melalui media online (WA Group) pengelola gedung, dll.;
- Menyelenggarakan kelas pajak online dalam rangka pengisian dan pelaporan SPT Tahunan;
- Melakukan publikasi kewajiban SPT Tahunan melalui media luar ruangan (spanduk, baliho, banner) maupun melalui internet (media sosial FB, Instagram, WA);
- Melakukan telepon/SMS/WA kepada WP OP prominen dan WP besar lainnya
- Melakukan Whatsapp blast ke WP aktif terdaftar;
- Bekerja sama dengan Kantor Layanan Informasi Perpajakan untuk melakukan voice blast;
- Melakukan Penerbitan surat teguran;
- Berkirim surat ke Pihak Pemerintah Kecamatan untuk konfirmasi alamat WP yang kembali pos (Kempos);
- Bekerja sama dengan pihak kecamatan, kelurahan, ketua RW dan RT untuk dapat membuka pojok pajak;

Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU kepatuhan adalah

- Korespondensi Surat ke WP lambat disampaikan dan direspon
- Banyak wajib pajak yang alamatnya tidak ditemukan

- Banyak WP OP yang belum memahami teknologi informasi

Untuk mengatasi kendala yang terjadi dilakukan langkah-langkah antara lain :

- Melakukan visit (kunjungan) ke wajib pajak guna memastikan keberadaan domisili atau alamat sebenarnya.
- Melakukan edukasi kepada wajib pajak melalui penyuluhan di kantor kelurahan, kegiatan pojok pajak di mall dan di KPP.

b. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Unit Kerja	Target	Realisasi	Presentase
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	4.543.688.325.000	4.547.121.998.538	100,08%

	Uraian	Menurut		
		Target	Realisasi	
1.	Raw Data			
	a. Pembilang	4.543.688.325.000	4.547.121.998.538	(3.433.
	b. Penyebut	4.543.688.325.000	4.543.688.325.000	-
2.	Realisasi IKU	100,00%	100,08%	
3.	Target IKU	100,00%	100,00%	
Indeks Capaian IKU		100,00%	100,08%	

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun 2024 telah mencapai 100,08%. Berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian penerimaan Pengawasan Pembayaran Masa antara lain:

- Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan;
- Penerbitan LHPt dan SP2DK pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25;
- Pemanggilan atas klarifikasi data dan penerbitan LHP2DK atas pengawasan tindak lanjut penyandingan data (data matching);
- Menjalin kerja sama dengan WP Pengelola VO;
- Meningkatkan kerja sama dengan Kelurahan dan Kecamatan;
- Penyisiran gedung perkantoran dan tenannya dan memastikan bahwa seluruh tenant yang ada dalam gedung tersebut sudah terdaftar di KPP Jakarta Mampang Prapatan; dan

- Penggalan potensi WP usaha perdagangan di marketplace dengan memanfaatkan aplikasi botsol dan web scrapping.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,49%	100,49%

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM

Unit Kerja	Target	Realisasi	Presentase
KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	540.180.795.000	542.836.488.174	100,49%

Berbagai upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dalam melakukan pencapaian penerimaan PKM diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan analisa dan penelitian bersama antara AR dan Supervisor melalui bedah profil WP Strategis;
- Pemanfaatan data yang diterima hasil CTA, *mirroring* hasil pemeriksaan, laporan audit akuntan public;
- Pengawasan dan Penggalan Potensi terhadap Wajib Pajak yang memiliki kegiatan usaha berbasis Penjualan secara daring/*online* (*Marketing Digital Technology*);
- Pemanggilan atas klarifikasi data dan penerbitan LHP2DK atas penyelesaian capaian kuantitas permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis;
- Peningkatan kepatuhan dan penerimaan dari sektor perdagangan melalui pemanfaatan aplikasi botsol dan *web scrapping*;
- Penggalan potensi dari artis/youtuber/influencer;
- Bekerjasama dengan fungsional pemeriksa dalam kegiatan Bedah profil Wajib Pajak untuk memperoleh data dan masukan yang lebih Komprehensif sehingga proses penggalan potensi pajak lebih optimal;
- Penggalan potensi WP usaha perdagangan di *marketplace* dengan memanfaatkan aplikasi botsol dan *web scrapping*;

- Pemanfaatan Aplikasi Botsol & *Web Scrapping*;
- Pemanfaatan Data Pemicu Approweb dengan jenis data konkret (Faktur Pajak, EOI, Bukti Potong, dll);
- Koordinasi dengan fungsional penyuluh dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan UMKM/BDS;
- Pengawasan STP dan Data konkret; dan
- Peningkatan kepatuhan sektor perdagangan.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,80%	88,80%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	111,08%	111,08%

a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Dalam hal Edukasi dan pelayanan yang efektif, kegiatan yang telah dilakukan yaitu dengan menyebar undangan penyuluhan ke seluruh target wajib pajak dengan media WA *Blast*, mengadakan sosialisasi secara daring dan luring secara rutin untuk edukasi wajib pajak, bekerja sama dengan instansi lain dan kelurahan untuk dapat memberikan edukasi, serta mengoptimalkan media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan dan kemudahan konsultasi untuk wajib pajak.

Rencana Aksi untuk tahun 2025 antara lain:

- Melakukan kegiatan penyuluhan melalui kelas pajak yang dilaksanakan secara online
- Memberikan edukasi kepada wajib pajak melalui media sosial
- Memasang Spanduk Penyuluhan
- Memberikan edukasi kepada wajib pajak UMKM melalui kegiatan BDS (*Bussiness Development Services*).
- Melaksanakan edukasi perpajakan melalui Kegiatan Pajak Bertutur.
- Berkolaborasi dengan public figure dalam rangka kegiatan edukasi perpajakan.

b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Berdasarkan Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024 diperoleh Indeks Efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah sebesar 111.08%.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,69%	120,00

KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah berusaha dalam pengawasan pembayaran masa dengan melakukan beberapa hal, yakni menerbitkan STP, melakukan tindak lanjut atas data pemicu Approweb, penambahan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi serta realisasi Wajib Pajak yang dilakukan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

Rencana Aksi untuk tahun 2025 antara lain:

- Melakukan penerbitan STP sesuai dengan daftar nominatif yang tersedia pada aplikasi approweb
- Melakukan pengawasan pembayaran wajib pajak secara rutin per masa pajak dan melakukan penerbitan STP
- Melakukan penelitian wajib pajak untuk dilakukan dinamisasi
- Melakukan penelitian dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan, atau upaya hukum (keberatan, banding, dan peninjauan kembali)
- Melakukan tindak lanjut data pemicu pada aplikasi approweb.

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00%

	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,47%	108,47%
--	--	---------	---------	---------

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP strategis dan WP Lainnya (Kewilayahan). Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Kewilayahan adalah:

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)						Capaian Kuantitas (Maks. 120%)
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi	
014 PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	492,05	544,2	110,60%	181,8	306,2	168,43%	120,00%

Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian Kualitas			
673,85	946,95	140,53%	132,32%	100%	120,00%

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Strategis adalah:

Unit Kerja	Komponen Penelitian (40 %)			Komponen Tindak Lanjut (60 %)				Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU (Max 120%)	
	Target LHPT	Jumlah Bobot LHPT	Capaian Penelitian (Max 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	LHP2DK dari SP2DK Outstanding	Capaian Tindak Lanjut (Max 120%)				
		atas DPP 2024	Dafnom		Jumlah Bobot LHP2DK						
014 PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN	200	403,1	120,00%	200	226,35	114	66,05	120,00%	120,00%	100%	120,00%

Jadi secara total realisasi IKU P4DK adalah 120%, baik wajib pajak strategis maupun wajib pajak kewilayahan telah mencapai target IKU permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, wajib pajak strategis memiliki capaian 120% dan wajib pajak kewilayahan 120% sehingga capaian IKU adalah 120%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai IKU P4DK diantaranya adalah sebagai berikut,

- Membentuk Tim Analisis Laporan Keuangan bersama FPP untuk membantu AR dalam mencari dan menyandingkan data secara lebih konkret
- Validasi data dan atau keterangan terlebih dahulu sebelum mengirim SP2DK kepada wajib pajak
- Penerbitan SP2DK berdasarkan data potensi di Approweb serta kegiatan bedah profil
- Memanfaatkan data pihak ketiga atau alat keterangan.
- Tindak lanjut SP2DK dengan usulan Pemsus dan P3 atas data konkret

- Penyusunan DSP4 berdasarkan mapping kepatuhan WP

b. Presentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (PKM) adalah sebagai berikut :

Rencana aksi tahun 2025 agar IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat tercapai secara optimal adalah mengintensifkan Wajib Pajak yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan, menindaklanjuti daftar nominatif STP selain tahun berjalan yang terdapat dalam Approweb, menerbitkan STP selain tahun berjalan atas keterlambatan pelaporan dan atau penyetoran pajak, menindaklanjuti data pemicu dan menerbitkan LHPT selain tahun berjalan.

c. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Triwulan IV Tahun 2024 108.47%. Berikut Rencana aksi tahun 2025:

- Memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif
- Menyampaikan Laporan tepat waktu
- Menindaklanjuti data pemicu yang turun dari KPDJP ataupun Kanwil.

7. Penegakan Hukum yang efektif

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,61%	116,61%
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	92,48%	120,00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00%

Dengan melakukan pemeriksaan baik yang bersifat rutin maupun khusus berdasarkan analisis risiko, serta melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan temuan berdasarkan data yang ada sehingga pemeriksaan berlangsung secara efektif.

Beberapa tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai target penagihan aktif dengan pencegahan, antara lain menerbitkan Surat Teguran, menerbitkan Surat Paksa, menerbitkan

SPMP, memblokir Rekening Perusahaan, memblokir Rekening Penanggung Pajak, Melakukan usulan Pencegahan Kepada Penanggung Pajak.

Rencana Aksi untuk tahun 2025 adalah dan menginventarisasi SP2 yang telah dilaksanakan baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus agar segera diselesaikan, menyelesaikan SP2 LB/restitusi dalam waktu mendekati 12 bulan, dan memastikan agar WP yang akan diusulkan Pemsus memenuhi kriteria : ada potensi, tingkat ketertagihan tinggi dan WP ditemukan. Dan untuk meningkatkan pencapaian penagihan aktif dengan pencegahan, akan dilakukan penelitian penanggung pajak yang mempunyai aset dengan tetap melakukan serangkaian tindakan penagihan aktif dimulai dari menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan Blokir.

8. Data dan Informasi yang berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00%

Dalam IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terdapat 2 komponen kegiatan. Yang pertama adalah persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan. Target yang diberikan selama setahun adalah 3 laporan kegiatan pengamatan dan realisasi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah sebanyak 6 laporan pengamatan.

Kemudian komponen selanjutnya adalah persentase penyediaan data potensi perpajakan. Penyediaan data potensi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah mencapai target yang ditentukan.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian penyediaan data diantaranya,

- Melakukan perekaman alket pada aplikasi alket sidjp-nine sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Monitoring dan evaluasi progres pembuatan alket oleh masing-masing AR secara optimal
- Optimalisasi kegiatan KPDL
- Melakukan persetujuan KPDL secara tepat waktu

9. SDM yang kompeten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
-------------------	-------------------------	--------	-----------	----------------

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,26	117,26
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,74	112,64
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,01	107,79

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Sampai dengan Triwulan IV, persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi telah mencapai realisasi sebesar 100% dengan rincian nilai JPM pejabat eselon IV semuanya diatas standar serta pegawai yang mengikuti UKT, semuanya dinyatakan lulus. Dengan ini diharapkan telah terjadi peningkatan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kapasitas sesuai tugas dan fungsi untuk mendorong produktivitas pegawai. Komponen kedua adalah kegiatan Kebintalan SDM. Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun 2025 adalah membuat usulan diklat bagi pegawai sesuai tugas dan fungsinya, membuat jadwal rencana penyelenggaraan IHT dan pelaksanaan *e-learning*, mendorong setiap seksi untuk dapat berkontribusi dalam menyelenggarakan IHT yang dapat mengembangkan kapasitas sesama pegawai, menyediakan waktu dan fasilitas untuk belajar bersama pegawai yang akan ujian.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Penghitungan skor indeks penilaian integritas unit dilaksanakan melalui kegiatan Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU). SPIU dilaksanakan dalam rangka pemenuhan IKU Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kode 9b-N - Indeks Penilaian Integritas Unit) atas layanan kepada Wajib Pajak pada 4 (empat) proses bisnis di Kantor Pelayanan Pajak yaitu Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan. Pada tahun 2024, hasil survei penilaian integritas unit di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mendapatkan

angka indeks realisasi sebesar 95.74 sehingga indeks capaian IKU Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah sebesar 112,64.

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 ini dari target 90 telah tercapai realisasi sebesar 97.01 sehingga capainnya adalah 107,79. Dialog Kinerja Organisasi KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah terlaksana sesuai dengan ketentuan sedangkan untuk Mitigasi Risiko yang dilaksanakan mencapai 100% pelaksanaan. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko antara lain dengan cara mengumpulkan bahan capaian realisasi NKO mulai akhir triwulan yang bersangkutan dan Menyusun jadwal DKO dan membuat laporan NKO sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir.

Pada tahun 2024 ada komponen baru dalam manajemen kinerja yaitu Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja yang dilakukan 1 kali setiap triwulan. KPP Pratama Jakarta Mampang telah melaksanakan penyampaian imbauan kepada seluruh pegawai tentang manajemen kinerja sebanyak 4x selama tahun 2024 dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut ke Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	120,00

Capaian IKU indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran s.d. triwulan IV 2024 sebesar 120,00. Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran belum optimal dikarenakan adanya belanja modal yang baru dilaksanakan pada triwulan IV dan beberapa pagu anggaran yang belum optimal dalam penyerapannya.

Berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran diantaranya;

- Melaksanakan rapat dengan Bidang/Bagian agar penyerapan optimal dengan tercapainya output
- Membagikan laporan realisasi anggaran dan berkoordinasi ke setiap Bidang per bulan

- Melakukan revisi halaman III DIPA apabila realisasi diperkirakan tidak sesuai dengan rencana penarikan dana

C. Kinerja Lainnya

Guna mendukung dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, kegiatan lainnya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah Kegiatan Penerimaan SPT Tahunan PPh dan Sosialisasi Pengisian SPT Tahunan PPh melalui *e-filing* yang dilakukan di beberapa lokasi WP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, maupun di wilayah kerja dan tempat lainnya, membuka pojok pajak di Kelurahan wilayah Kecamatan Mampang Prapatan, bekerja sama dengan ketua RT dan RW. Beberapa pegawai KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga mendapat predikat AR strategis terbaik di Kanwil DJP Jakarta Selatan I dan beberapa mendapat peringkat tinggi secara nasional.

Perkembangan teknologi informasi semakin memainkan peran yang signifikan dalam pelayanan publik, salah satunya adalah layanan di bidang perpajakan. Kecepatan, keamanan, dan kemudahan akses data menjadi tuntutan utama yang harus bisa disediakan oleh lembaga pelayanan publik masa kini. Untuk itu, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan berupaya untuk mengoptimalkan teknologi informasi dengan menciptakan inovasi layanan kepada Wajib Pajak seperti :

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan telah menerima DIPA dengan pagu belanja sebesar Rp7.493.780.000,- dengan rincian pagu belanja pegawai sebesar Rp856.970.000,-, belanja barang sebesar Rp5.211.876.783,- dan belanja modal sebesar Rp1.192.849.100,-.

Realisasi penggunaan DIPA oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun 2024 sebesar Rp7.249.467.953,- atau sebesar 92,12% dari pagu anggaran. Dengan rincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp856.970.000,-. Realisasi belanja barang sebesar Rp602.782.780,- dan realisasi belanja modal sebesar Rp1.192.849.100,-.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan tidak pernah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja negara, jika dana untuk membiayai tindakan itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam Anggaran Belanja Negara (sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Keppres 17 Tahun 2000).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2024.
3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap Pegawai di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berintegritas tinggi baik dalam pelayanan kepada Wajib Pajak maupun intensifikasi penerimaan pajak.
4. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk pelayanan informasi peraturan kepada Wajib Pajak, pembangunan dan penataan ruang tempat pelayanan, dan lain sebagainya.

B. Penutup

Alhamdulillah KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan pada tahun 2024 mencapai target penerimaan pajak di atas 100% 5 (lima) tahun berturut – turut, berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), dan mendapat Penghargaan sebagai Unit dengan Kinerja Edukasi Terbaik Pertama Tingkat Nasional Tahun 2024 .

Demikian Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2024. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Mampang Prapatan yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Kepala Kantor, para Kepala Seksi, Supervisor dan Fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka yang memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Januari 2025

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Mampang Prapatan



Ditandatangani secara elektronik

Suandiman Situmorang





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I
KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN

LAMPIRAN

NKO TRIWULAN IV TAHUN 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KPP KPP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	96,77
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							96,77
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,12
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	92,18	Max	P/L	19,00%	42,22%	92,18
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,89
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,28
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,08%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,08
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,92%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,92
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,49%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,49
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,69
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,54
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,08%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,08
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,69%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,15
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	108,47%	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,47
7	Penegakan hukum yang efektif							111,78
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,61%	Max	P/M	14,00%	26,92%	116,61
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	92,48%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,28
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,55
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,26	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,26
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,74	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,64
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,01	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,79
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,45

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB